

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(CALK)
TAHUN ANGGARAN 2021

DINAS SOSIAL KABUPATEN LUMAJANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



I. PENDAHULUAN

Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2021. CaLK dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pemakai informasi laporan keuangan secara luas tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu. Oleh sebab itu laporan keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman, laporan keuangan dilengkapi dengan catatan atas laporan keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan.

Kesalahpahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari pembaca laporan keuangan. Pembaca yang terbiasa dengan orientasi anggaran mempunyai potensi kesalahpahaman dalam memahami konsep akuntansi akrual. Pembaca yang terbiasa dengan laporan keuangan sektor komersial cenderung melihat laporan keuangan pemerintah seperti laporan keuangan perusahaan. Untuk itu catatan atas laporan keuangan menjadi sangat penting bagi pengguna laporan keuangan pemerintah. Selain itu, pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan akuntansi yang diterapkan akan membantu pengguna laporan keuangan untuk dapat menghindari kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan.

1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

a. Tujuan Umum

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, hasil operasi dan perubahan ekuitas yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

b. Tujuan Khusus

Salah khusus tujuan pelaporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas atas sumber daya dengan:

- 1) Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah daerah;
- 2) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah daerah;
- 3) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- 4) Menyediakan informasi mengenai ketepatan realisasi terhadap anggarannya;
- 5) Menyediakan informasi mengenai cara pemerintah daerah mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- 6) Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
- 7) Menyediakan informasi yang berguna untuk menganalisis kemampuan pemerintah daerah dalam mendanai aktivitasnya.

2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
- c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5688) sebagaimana

- telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 - b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 - e. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - f. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - g. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- L. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567) sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6027);
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
- r. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- ka. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- v. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- ta. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- ka. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5465);
- y. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5503);
- z. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- aa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- bb. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akumulasi Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1424);
- cc. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 07 Tahun 2007 Tentang Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- dd. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 72 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi;
- ee. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 73 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah; dan
- ff. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 74 Tahun 2014 tentang Bagian Akun Standar.
- gg. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 9);
- hh. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 95 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- ii. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- jj. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 65 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

3. SISTEMATIKA

Calak berisi penjelasan atau daftar-daftar terinci atau analisis atas suatu pos yang disajikan di dalam laporan realisasi anggaran, rencana, laporan operasional, dan laporan perubahan ekuitas. Calak juga menyajikan informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Penyusunan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Sistematika Catatan atas Laporan Keuangan sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

	1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
	1.3. Sistematisa Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan
BAB II	KEJURUSAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SKPD
	2.1. Indikator Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD
	2.2. Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target Kinerja
BAB III	PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD
	3.1. Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran <ul style="list-style-type: none"> a. Pendapatan Daerah b. Belanja Daerah c. Transfer d. Pembiayaan
	3.2. Penjelasan Pos-pos Neraca <ul style="list-style-type: none"> a. Aset b. Kewajiban c. Ekuitas
	3.3. Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional <ul style="list-style-type: none"> a. Pendapatan Laporan Operasional b. Baban c. Kegiatan Non Operasional d. Pos-pos Luar Biasa e. Surplus (Defisit) LO
	3.4. Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
	3.5. Penjelasan Pos-pos Laporan Arus Kas
	3.6. Pengungkapan atas Pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada pemerintah daerah
BAB IV	INFORMASI NON KEUANGAN
BAB V	PENUTUP

II. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN OPD

2.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SKPD

Pencapaian target kinerja keuangan Dinas Sosial Kabupaten Lumajang Tahun 2021 sebagai berikut.

a. BELANJA DAERAH

Belanja merupakan pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

Anggaran belanja daerah yang dikelola oleh Dinas Sosial Kabupaten Lumajang meliputi belanja Operasi dan belanja Modal. Belanja Operasi meliputi belanja gaji dan tunjangan dan belanja yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sedangkan belanja modal meliputi belanja yang mempengaruhi jumlah asset Dinas Sosial

Ikhtisar pencapaian kinerja pengeluaran belanja tahun 2021 sebagaimana tabel berikut :

Tabel I Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan – Belanja Tahun 2021

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	Belanja Operasi	15.161.071.182,00	14.873.791.334,00	98,11	287.279.848,00
2	Belanja Modal	378.686.736,00	378.363.169,80	99,91	323.566,20
	Jumlah Belanja	15.539.757.918,00	15.252.154.503,80	98,15	287.603.414,20

Pembandingan realisasi jenis belanja selama 5 (lima) tahun terakhir sebagaimana Tabel berikut.

Tabel 11 Perkembangan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2017 - 2021

Belanja	2017	2018	2019	2020	2021
Belanja Pegawai	469.281.300	1.478.160.510	2.204.569.417	2.574.118.001	2.371.988.669,00
Belanja Barang	2.674.347.639	3.142.158.278	3.795.098.788	1.921.354.033	2.203.167.165,00
Belanja Hibah	0	0	0	0	1.190.000.000,00
Belanja Bantuan Sosial	0	0	310.464.600	136.000.000	9.198.607.500,00
Belanja Modal	1.231.824.700	1.016.161.300	368.094.215,36	140.900.000	378.363.170,80
Jumlah	4.270.557.649	5.288.463.988	6.082.166.428,36	4.940.372.134	13.241.154.905,80
%	84,78	85,24	92,66	96,94	98,13

2.2. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA PROGRAM

Realisasi kinerja berdasarkan program dan kegiatan pada tahun 2021 sebagai berikut :

Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Barang & Jasa	580.000	580.000	Belanja Barang dan Jasa Meliputi: a. Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor - cetak b. Belanja lembur
Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Kegiatan	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Barang & Jasa	890.000	890.000	Belanja Barang dan Jasa Meliputi: a. Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan kantor - cetak

			b. Belanja Istimewa
Program	: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Kegiatan	: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Pegawai	2.372.837,190	2.361.680,583	Tidak Ada Anggaran Belanja Pegawai
			<ul style="list-style-type: none"> a. Belanja Gaji Pokok PNS b. Belanja Tunjangan Keluarga PNS c. Belanja Tunjangan Jabatan PNS d. Belanja Tunjangan Fungsional umum PNS e. Belanja Tunjangan Beras PNS f. Belanja Tunjangan PPI/ Tunjangan Khusus PNS g. Belanja Perbulatan Gaji PNS h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS i. Belanja Iuran jaminan Kematian PNS j. Tambahan Penghasilan berdasarkan Debit Kerja PNS
Program	: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Kegiatan	: Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Pegawai	9.977.086,00	9.977.086,00	Belanja Pegawai Melalui : <ul style="list-style-type: none"> a. Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan b. Belanja Honorarium Pengabdian Darang/Jasa
Belanja Barang & Jasa	1.855.000,00	1.855.000,00	Belanja Barang & Jasa Melalui : <ul style="list-style-type: none"> a. Belanja Istimewa
Program	: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Kegiatan	: Pengadaan Pakalon Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja	17.127.550,00	17.050.000,00	Belanja Barang & Jasa

Barang & Jasa			Meliputi : a. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perengkapan Dasar
Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Kegiatan	Penyediaan Komputer basedasi Listrik/Perengkapan Danganan Kantor		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Barang & Jasa	12.762.520,00	12.755.300,00	Belanja Barang & Jasa Meliputi : a. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik
Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Kegiatan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Belanja Barang & Jasa	79.285.454,00	76.546.200,00	Belanja Barang & Jasa Meliputi : a. Belanja Bahan-Bahan Lainnya b. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor c. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak
Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Kegiatan	Penyediaan Barang Cetak dan Pengiriman		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Barang & Jasa	16.535.300,00	16.427.390,00	Belanja Barang & Jasa Meliputi : a. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak
Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Kegiatan	Penyediaan Bahan Bagan dan Peraturan Perundang-undangan		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Barang & Jasa	2.920.000,00	2.920.000,00	Belanja Barang & Jasa Meliputi : a. Belanja Langganan

			Jumlah/Surat Keban/Majalah
Program	: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Kegiatan	: Fasilitas Kunjungan Tamu		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Barang & Jasa	111.000,00	316.000,00	Belanja Barang & Jasa meliputi: a. Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu
Program	: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Kegiatan	: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Komunikasi SKPD		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Barang & Jasa	58.365.000,00	57.663.020,00	Belanja Barang & Jasa meliputi: a. Belanja Makanan dan Minuman Rapat b. Belanja Perjalanan Dinas Bina c. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
Program	: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Kegiatan	: Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	181.881.040,00	181.611.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin meliputi: a. Belanja Modal Mebel b. Belanja Modal Alat Pendingin c. Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) d. Belanja Modal Personal Computer e. Belanja Modal Peralatan Personal Computer
Program	: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Kegiatan	: Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Barang & Jasa	2.196.000,00	2.087.740,00	Belanja Barang & Jasa meliputi: a. Belanja Air/Minuman

			untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos b. Belanja Maka/Pengiriman
Program	: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Kegiatan	: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Barang & Jasa	101.829.932,00	76.392.507,00	Belanja Barang & Jasa Meliputi : a. Belanja Tagihan Telepon b. Belanja Tagihan Air c. Belanja Tagihan Listrik d. Belanja Rakun/Faksimili/ Internet/TV Berlangganan
Program	: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Kegiatan	: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Barang & Jasa	649.722.000,00	627.288.279,00	Belanja Barang & Jasa Meliputi : a. Belanja Jasa Tenaga Administrasi b. Belanja Jasa Tenaga Kebersihan c. Belanja Jasa Tenaga Keamanan d. Belanja Jasa Tenaga Supir e. Belanja Lembar f. Belanja Juran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN g. Belanja Juran Jaminan Kecekaman Kerja bagi Non ASN h. Belanja Juran Jaminan Kematian bagi Non ASN
Program	: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		

Kegiatan	: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Barang & Jasa	168.271.110,00	164.913.910,00	Belanja Barang & Jasa meliputi : a. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas b. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaran Dinas Bermotor Perangau
Program	: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KADILPAHEN KOTA		
Kegiatan	: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Barang & Jasa	77.682.000,00	77.665.000,00	Belanja Barang & Jasa meliputi : a. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin b. Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer c. Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer
Program	: PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		
Kegiatan	: Peningkatan Kemampuan Pemasok Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Barang & Jasa	229.151.400,00	217.453.400,00	Belanja Barang & Jasa meliputi : a. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Hewan Cetak b. Belanja Makanan dan Minuman Rapat c. Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara d. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

Program 1: PROGRAM PEMBORDAYAAN SOSIAL			
Kegiatan : Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelompok Masyarakat Kecamatan Kabupaten Kota			
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Barang & Jasa	229.934.900,00	213.020.800,00	<p>Belanja Barang & Jasa meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor b. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak c. Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat d. Belanja Makanan dan Minuman Rapat e. Belanja Paksiwa f. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembaawa Acara, dan Panitia g. Belanja Jasa Juri Perlombaan/Perandingan h. Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara i. Belanja Lembur j. Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya k. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota l. Belanja Hadiah yang Bersifat Pertunjukan
Belanja Hibah	1.100.000.000	1.100.000.000	<p>Belanja Hibah meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Berentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Belanja Bantuan Sosial	4.172.600.000,00	4.172.600.000,00	Belanja Bantuan Sosial : a. Belanja Bantuan Sosial Uang yang Dimerencanakan kepada Lembaga Non Pemerintah (Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Bidang Lainnya)
Program	: PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		
Kegiatan	: Penyediaan Permukiman		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Pegawai	1.129.000,00	1.029.000,00	Belanja Pegawai meliputi : a. Belanja Honorarium Penanggungjawab dan Pengelola Keuangan
Belanja Barang & Jasa	206.711.700,00	201.010.700,00	Belanja Barang & Jasa meliputi : a. Belanja Bahan-basi Tabung Gas b. Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu c. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan (Jusana Sosial) d. Belanja Tagihan Air
Program	: PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		
Kegiatan	: Pelatihan Sisdang		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Barang & Jasa	25.903.200,00	25.903.200,00	Belanja Barang & Jasa meliputi : a. Belanja Bahan-Bahan Lunak
Program	: PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		
Kegiatan	: Pelayanan Layanan Kedaruratan		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Barang & Jasa	2.960.000,00	2.960.000,00	Belanja Barang & Jasa meliputi : a. Honorarium Karasumber atau Pembuat, Minderwar, Pembawa Aera, dan Panitia b. Belanja Pelayanan Dinas Dalam Kota

Program	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		
Kegiatan	Pemberian Layanan Keperawatan		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Barang & Jasa	4.044.000,00	3.040.000,00	Belanja Barang & Jasa Meliputi : a. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Penyany Acara, dan Panitia b. Belanja Jasa Tenaga Kebersihan c. Belanja Pajalasan Dinas Ubin Kula
Program	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		
Kegiatan	Penyediaan Permakanan		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Barang & Jasa	1.048.700,00	1.048.700,00	Belanja Barang & Jasa Meliputi : a. Belanja Bahan-basi Tabung Gas b. Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu c. Belanja Tagihan Air
Program	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		
Kegiatan	Penyediaan Alat Bantu		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Modal Perolehan dan Mesin	6.255.150,00	6.255.150,00	Belanja Modal Perolehan dan Mesin meliputi : a. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum
Program	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		
Kegiatan	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten Kula		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Barang & Jasa	47.679.000,00	45.736.860,00	Belanja Barang & Jasa meliputi : a. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak b. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

Program	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		
Kegiatan	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Barang & Jasa	131.491.700,00	133.763.730,00	Belanja Barang & Jasa meliputi : a. Belanja Bahan-Bahan Lainnya b. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor c. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Hahan Cetak d. Belanja Natura dan Pakan-Natura e. Belanja Lembur f. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
Program	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		
Kegiatan	Pelayanan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Barang & Jasa	R20.000,00	20.000,00	Belanja Barang & Jasa meliputi : a. Belanja Makanan dan Minuman Rapat b. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
Belanja Bantuan Sosial	5.198.700.000,00	5.076.037.500,00	Belanja bantuan sosial meliputi : a. Belanja Bantuan Sosial Uang yang Ditembakkan kepada Individu b. Belanja Bantuan Sosial Barang yang Ditembakkan kepada Keluarga
Program	PROGRAM PENANGANAN BENCANA		
Kegiatan	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Pegawai	300.000,00	300.000,00	Belanja Pegawai meliputi : a. Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan

Belanja Barang & Jasa	70.634.000,00	67.128.200,00	Belanja Barang & Jasa Meliputi : a. Belanja Bahan-Bahan Lainnya b. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak c. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos d. Belanja Makanan dan Minuman Ringan e. Honorarium Narasumber atau Pembicara, Moderator, Pemhawa Acara dan Panitia f. Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara g. Belanja Lembur h. Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang i. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
Program	: PROGRAM PENANGANAN BENCANA		
Kegiatan	: Koordinasi Sosialisasi dan Pelaksanaan Teruna Sligo Bencana		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Barang & Jasa	95.207.000,00	95.207.000,00	Belanja Barang & Jasa Meliputi : a. Belanja Bahan-Jasa Tabung Gas b. Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara c. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
Program	: PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM		
Kegiatan	: Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Barang & Jasa	19.907.200,00	19.907.200,00	Belanja Barang & Jasa Meliputi : a. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas b. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-

			Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	190.330.546,00	192.195.019,80	Belanja Modal Gedung dan Bangunan meliputi : a. Belanja Modal Taman

1.3. POSISI KEUANGAN

Posisi keuangan sebagaimana terjamin di neraca daerah terdiri atas aset, kewajiban dan ekuitas daerah. Aset merupakan sumber daya ekonomis yang dikuasai daerah atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau manfaat sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh. Baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk menyediakan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Sedangkan ekuitas dana mencerminkan kekayaan bersih pemerintah yaitu selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Posisi keuangan SKPD Dinas Sosial selama 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut :

Tabel 2.1 Perkembangan Posisi Keuangan Per 31 Desember 2017 s.d. 2021

Posisi Keuangan	2017	2018	2019	2020	2021
Aset	1.768.730.908,08	1.510.179.061,16	5.150.420.884,02	1.170.171.000	6.139.733.468,47
Kewajiban	6.341,440	9.134.340	74.773.421,00	74.771.427	
Ekuitas	1.762.410.469,18	1.499.044.719,18	5.175.646.295,02	3.751.969.846	6.064.962.331,07
Jumlah Kewajiban & Ekuitas	1.768.730.908,08	1.508.179.061,16	5.250.410.184,02	1.100.171.000	6.068.730.331,07

2.4 HAMBATAN DAN KENDALA DALAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Beberapa permasalahan yang menjadi penghambatan dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan sebagai berikut.

2.4.1 Masalah Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan. Kondisi SDM yang ada pada saat ini secara umum masih terbatas jumlahnya khususnya yang memiliki kualifikasi atau skill sesuai kebutuhan penerapan sistem akuntansi berbasis akrual.

Fungsi akuntansi yang ada di PPK SKPD belum sepenuhnya dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini dikarenakan yang melaksanakan fungsi akuntansi PPK SKPD tidak memiliki kompetensi yang memadai dalam bidang akuntansi, akibatnya penyusunan laporan keuangan SKPD menjadi terhambat yang berdampak pada keterlambatan konsolidasi laporan keuangan pemerintahan daerah.

Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan mengaplikasikan SDM yang ada dengan jalan meningkatkan kemampuannya dengan menugaskan untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, pembinaan-pembinaan secara intensif dan lain-lain baik formal maupun non formal yang dibiayai/diarahkan sendiri oleh BKD, BPKD dan Trajektoral.

2.4.2 Lemahnya pemahaman aparatur terhadap regulasi tentang pengelolaan keuangan dan barang daerah

Pengelolaan keuangan daerah memerlukan pemahaman yang memadai terhadap regulasi yang mengununginya. Selama ini pemahaman terhadap regulasi yang masih lemah seringkali menjadi permasalahan tersendiri bagi pejabat pengelola keuangan daerah. Hal ini disebabkan seringkali aturan-aturan yang melandasainya berubah sesuai dengan perkembangan terkini terhadap kondisi keuangan negara/daerah.

Upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan pemahaman SDM terhadap regulasi yang mengatur pengelolaan keuangan dan barang daerah adalah dengan jalan mengikuti bimbingan teknis dan pembinaan-pembinaan secara rutin dan berkala serta melakukan konsultasi-konsultasi kepada instansi yang berkompeter misalnya BPKD dan Inspektorat.

2.4.3 Masalah sistem pengendalian intern

Salah satu permasalahan utama yang sedang dihadapi terkait dengan implementasi sistem pengendalian Intern adalah lemahnya sistem manajemen aset/ barang daerah. Pengelolaan barang daerah masih menghadapi berbagai permasalahan yang memerlukan penanganan yang

serius. SKPD masih menganggap barang daerah hulu sebagai bagian yang penting dalam pengelolaan keuangan dan barang daerah, sehingga administrasi barang daerah masih lemah. Indikatornya adalah masih banyak aset atau barang daerah yang tidak tercatat di dalam laporan barang inventaris, barang-barang yang hilang atau rusak tidak dilakukan penghapusan sehingga masih tercatat di laporan barang inventaris. Disamping itu masih terdapat aset-aset pihak lain yang terseraf dan diakui sebagai aset Pemerintahan Daerah.

Permasalahan tersebut di atas melalui kegiatan validasi dan verifikasi atas aset SKPD melalui kegiatan yang di koordinasikan oleh BPKD Kabupaten Lumajang.

III. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

3.1 PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Informasi yang disajikan di dalam LRA SKPD Dinas Sosial hanya mencakup belanja-LRA, karena bukan merupakan SKPD penghasil.

3.1.1 BELANJA

	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
1. Belanja Daerah	15.539.757.918,00	15.252.154.503,80	4.929.914.273,00

Belanja daerah meliputi belanja operasi dan belanja modal. Realisasi belanja tahun 2021 sebesar Rp 15.252.154.503,80 Realisasinya mencapai 98,15% dari anggaran sebesar Rp 15.539.757.918,00 Dibandingkan dengan tahun 2020, realisasi belanja Tahun 2021 naik 1,21 % Realisasi belanja 2020 sebesar Rp. 4.929.914.273,00 mencapai 96,94%

	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
2) Belanja Operasi	15.161.071.182,00	14.873.791.334,00	4.789.014.273,00

Belanja operasi pada SKPD Dinas Sosial terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang dan jasa, dengan realisasi sebagai berikut:

Tabel : 3.1. Realisasi Belanja Operasi tahun 2021 dan 2020

No	Belanja Operasi	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	Belanja Pegawai	2.383.143.276,00	2.371.986.669,00	99,53	2.492.118.101,00
2	Belanja Barang dan Jasa	2.306.627.976,00	2.209.167.165,00	95,81	1.920.896.172,00
3	Hibah	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	100,00	0
4	Danbuan Sosial	9.271.300.000,00	9.198.637.500,00	98,16	136.000.000,00
	Jumlah	13.161.171.182,00	14.879.791.334,00	98,11	4.789.014.273,00

	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
(ii) Belanja Pegawai	2.383.143.276,00	2.371.986.669,00	2.492.118.101,00

Belanja pegawai meliputi belanja gaji dan tunjangan pegawai dan belanja pegawai yang terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan SKPD.

Rincian realisasi belanja pegawai sebagai berikut :

Tabel : 3.2. Realisasi Belanja Pegawai tahun 2021

No	Rincian Belanja Pegawai	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	Gaji pokok PNS / uang representasi	1.140.056.043,00	1.140.199.669,00	99,86	1.052.266.430
2	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	110.580.777,00	109.703.786,00	99,19	101.518.728
3	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	166.000.000,00	165.899.900,00	99,94	147.095.000
4	Belanja Tunjangan Fungsional Lulusan PNS	16.895.000,00	16.595.000,00	98,43	18.275.000
5	Belanja Tunjangan Beras PNS	61.022.559,00	60.832.800,00	99,69	48.376.500
6	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	2.647.215,00	2.591.647,00	97,90	2.322.422
7	Belanja Pembulanan Gaji PNS	21.091,00	15.878,00	75,28	14.431
8	Belanja Uang Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.350.902,00	2.340.751,00	99,61	2.762.118

Nu	Rincian Belanja Pegawai	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
9	Belanja Tunai Jaminan Kematian PNS	7.050.075,00	7.022.507,00	99,61	
10	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	862.610.427,00	856.478.805,00	99,29	761.380.963
11	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	8.213.955,00	8.213.955,00	100,00	
12	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2.092.131,00	2.092.131,00	100,00	
13	Honorarium PNS				47.930.000
14	Honorarium Non PNS				315.900.000
15	Uang Isobar Pns				28.401.000
	Jumlah Belanja Pegawai	2.383.143.276,00	2.371.986.669,00	99,43	2.432.118.104,00

	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
(b) Belanja Barang dan Jasa	2.306.627.906,00	2.203.167.165,00	1.920.896.172

Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah, meliputi belanja persediaan, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas dan belanja lainnya. Rincian realisasi belanja barang dan jasa tahun 2021 dan 2020 sebagai berikut :

Tabel : 3.3. Realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun 2021

No	Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020
1	Belanja Persediaan	0,00	0,00	641.873.790
2	Belanja Barang	801.192.224,00	771.671.019,00	
3	Belanja Jasa	904.460.932,00	862.857.326,00	884.903.620
4	Belanja Pemeliharaan	182.224.750,00	178.850.600,00	166.102.982
5	Belanja Perjalanan Dinas	399.000.000,00	370.438.020,00	222.277.180

6	Belanja Lainnya	0,00	0,00	5.739,000
7	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	19.350.000,00	19.110.000,00	0,00
	Jumlah	2.306.627.906,00	2.203.167.165,00	1.424.036.173

(II) Belanja Barang

Belanja barang meliputi belanja yang akan menambah persediaan. Belanja Barang sampai dengan 31 Desember 2021 terealisasi sebesar Rp. 771.671.019,- terinci sebagai berikut.

Tabel 3.4. Realisasi Belanja Barang tahun 2021

No.	Belanja Barang	Anggaran	Realisasi
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	92.368.350,00	91.016.300,00
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	12.762.530,00	12.755.300,00
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	93.798.350,00	86.132.000,00
4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Berkas Pos	6.000.000,00	3.523.000,00
5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	17.127.350,00	17.050.000,00
6	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	74.381.000,00	74.385.519,00
7	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	95.101.054,00	94.179.500,00
8	Belanja Bahan-Ist/Tanggung Cas	2.530.000,00	2.130.000,00
9	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tahun	2.783.400,00	2.766.400,00
10	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	61.395.000,00	52.905.000,00
11	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Utusan Sosial	199.575.000,00	193.964.000,00
12	Belanja Nonum dan Pakan-Natura	87.615.000,00	84.480.000,00
13	Belanja Pakhwa Olahraga	24.750.000,00	24.684.000,00
14	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	31.000.000,00	31.000.000,00
	Jumlah	801.192.224,00	771.671.019,00

(2) Belanja Jasa

Belanja Jasa sampai dengan 31 Desember 2021 realisasi sebesar Rp. 862.857.526,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.5 : Realisasi Belanja Jasa Tahun 2021

No	Belanja Jasa	Anggaran 2021	Realisasi 2021
1	Belanja Jasa Juri Perolehan/ Pendaftaran	1.800.000,00	1.800.000,00
2	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	89.000.000,00	96.750.000,00
3	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	406.800.000,00	399.600.000,00
4	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	54.000.000,00	45.000.000,00
5	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	128.400.000,00	128.400.000,00
6	Belanja Jasa Tenaga Sempit	18.000.000,00	18.000.000,00
7	Belanja Kawab/Pasir/Intensitas/TV Bajirangan	18.000.000,00	16.404.000,00
8	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/ Majalah	2.920.000,00	2.920.000,00
9	Belanja Lumbur	17.417.000,00	17.309.000,00
10	Belanja Paket Pengiriman	726.000,00	617.740,00
11	Belanja Tagihan Air	19.091.400,00	13.171.200,00
12	Belanja Tagihan Listrik	65.141.732,00	49.558.897,00
13	Belanja Tagihan Telepon	3.688.800,00	1.280.410,00
14	Honorarium Narasumber atau Pemulas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	11.900.000,00	12.300.000,00
15	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Kerja bagi Non ASN	2.880.000,00	2.623.575,00
16	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.800.000,00	535.221,00
17	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	39.600.000,00	34.888.480,00
18	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	8.700.000,00	8.700.000,00
19	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Darang	3.750.000,00	3.750.000,00
20	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penlol Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	9.250.000,00	9.250.000,00
	Jumlah	904.860.932,00	862.857.526,00

(3) Belanja Pemeliharaan

Belanja Pemeliharaan sampai dengan 31 Desember 2021 terealisasi sebesar Rp. 178.850.600,00 berturut sebagai berikut.

Table 3.6 : Realisasi Belanja Pemeliharaan tahun 2021

No	Belanja Pemeliharaan	Anggaran 2021	Realisasi 2021
1	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perseorangan	104.542.750,000	101.185.600,00
2	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tinggal-Alat Rumah Tinggal-Alat Pendingin	7.150.000,00	7.150.000,00
3	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer-Unit-Personal Computer	15.400.000,00	15.400.000,00
4	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	55.132.000,00	55.115.000,00
	Jumlah	182.224.750,00	178.850.600,00

(4) Belanja Perjalanan Dinas

Belanja perjalanan dinas melalui belanja untuk perjalanan dinas baik dalam maupun luar daerah. Belanja Perjalanan Dinas sampai dengan 31 Desember 2021 terealisasi sebesar Rp. 370.438.020,00 terinci sebagai berikut.

Table 3.7 : Realisasi Belanja Perjalanan Dinas tahun 2021

No.	Belanja Perjalanan Dinas	Anggaran 2021	Realisasi 2021
1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	48.130.000,00	47.897.020,00
2	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	350.870.000,00	322.541.000,00
	Jumlah	398.999.999,99	370.438.020,00

(5) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Tihak Lain/Masyarakat)

Belanja lainnya adalah belanja untuk pembelian/pengadaan barang-barang G&A/konsumsi yang tidak dikapitalisasi ke dalam aset tetap. Realisasi belanja lainnya sampai dengan 30 Desember 2020 senilai Rp. 5.730.000 berikut sebagai berikut.

Tabel 3.3: Realisasi Belanja Lainnya Tahun 2021

No	Belanja Lainnya	Anggaran 2021	Realisasi 2021
1	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Tihak Lain/Masyarakat	19.350.000,00	19.350.000,00
	Jumlah	19.350.000,00	19.350.000,00

	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
(c) Belanja Hibah	1.100.000.000	1.100.000.000	0,00

No	Belanja Lainnya	Anggaran 2021	Realisasi 2021
1	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.100.000.000	1.100.000.000
	Jumlah	19.350.000,00	19.350.000,00

	Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
(d) Belanja Bahan Sosial	9.271.300.000,00	9.198.637.500,00	330.000.000

Belanja Bantuan adalah belanja untuk pengadaan barang-barang yang digunakan untuk Bantuan Sosial. Realisasi belanja bantuan Sosial sampai dengan 31 Desember 2021 terrealisasi sebesar Rp. 9.198.637.500,00 (winski sebagai berikut

Tabel 3.9 Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2021

No	Belanja Bantuan Sosial	Anggaran 2021	Realisasi 2021
1	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	5.089.200.000,00	4.960.800.000,00
2	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	115.500.000,00	115.237.400,00
3	Belanja Bantuan Sosial Lain yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bakam, Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	4.172.600.000,00	4.122.600.100,00
	JUMLAH	9.377.300.000,00	9.198.637.500,00

Tabel : 3.2 Realisasi Belanja Modal tahun 2021 dan 2020

	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
(e) Belanja Modal	378.686.736,111	378.043.169,80	144.440,000

Belanja modal meliputi belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jembatan, belanja modal aset tetap lainnya dan belanja modal aset lainnya.
Realisasi belanja modal tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 3.3.1 : Realisasi Belanja Modal Tahun 2021

No	Jenis Belanja Modal	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	Belanja Modal Aset Peningin	49.808.880,00	49.764.000,00	99,90	
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin				135.500,000
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan				5.400,000
4	Belanja Modal Aset Rumah	15.418.900,00	35.710.000,00	99,60	

	Tangga Lainnya (Home Use)				
5	Belanja Modal Mebel	1.140.000,00	3.080.000,00	98,99	
6	Belanja Modal Alat Kantor/Kecoa	6.255.150,00	6.225.350,00	99,52	
7	Belanja Modal Personal Computer	53.341.200,00	53.322.000,00	99,97	
8	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	40.172.000,00	40.161.000,00	99,97	
9	Belanja Modal Tanah	190.550.546,00	190.495.019,80	99,97	
	Jumlah	378.686.736,00	378.363.169,80	99,91	140.900.000

PEMBAHASAN POS-POS NERACA

a. ASSET LANCAR

Asset lancar per 31 Desember 2021 dan 2020 terdiri dari kas dan setara kas, piutang, biaya di bayar di muka dan persediaan sebagai berikut:

Tabel : Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2021 dan 2020

Keterangan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Kas di bendahara pengeluaran	00,0	00,0
Kas di bendahara penerimaan	00,0	00,0
Kas lainnya	00,0	00,0
Piutang pajak	00,0	00,0
Piutang subsidi	00,0	00,0
Penyisihan Piutang Tak Tertagih	00,0	00,0
Biaya Dibayar Dimuka	00,0	00,0
Persediaan	1.016.215.800,00	17.777.500,00
Jumlah	1.016.215.800,00	17.777.500,00

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
a) Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00

Kas di bendahara pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan diawasi tanggungjawab bendahara pengeluaran SKPD yang berasal dari Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diterima dari Bendahara Utama Daerah (BUD). Pada akhir periode saldo kas di bendahara pengeluaran meliputi sisa UP/GU/TU yang belum dipanggajawabkan dan belum disetor kembali ke kas daerah.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp 0,00, dengan rincian sebagai berikut,

Tabel Mutasi kas di bendahara pengeluaran tahun 2021 dan 2020

1. Saldo 31 Desember 2020		00,0
2. Penerimaan :		
- SP2D UP	135.000.000	
- SP2D TUP	211.540.200	
- SP2D GII	2.483.134.486	
- Penerimaan PPK	00	
Jumlah Penerimaan		2.849.674.686
3. Pengeluaran :		
- SPJ UP/GU	2.188.134.486	
- SPJ GU Nilai	140.960.591	
- SPJ TL, Nilai	209.110.200	
- Setor kembali sisa TUP	2.730.000	

-Setor kembali sisa UPKUU	39.409	
-Pengeksharan PPK	00	
-Setor kembali sisa UPKUU/PTU tahun lalu	00	
Jumlahi pengeksharan		2.489.974,666
4. Saldo 31 Desember 2021		00

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
b) Kas di Bendahara Penerimaan	00,0	00,0

Kas di bendahara penerimaan mencakup seluruh kas baik saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai yang berada di bawah tanggungjawab bendahara penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan. Pada akhir periode saldo kas di bendahara penerimaan menunjukkan saldo yang berasal dari pendapatan yang telah diterima oleh bendahara penerimaan yang belum disalurkan ke kas daerah sampai dengan 31 Desember 2021.

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp. 00 dan Rp. 00 Rincian mutasi kas di Bendahara Penerimaan sebagai berikut,

Tabel ____ : Rincian saldo kas di bendahara penerimaan Tahun 2021

Bulan	Saldo awal	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir
Januari	00,0	00,0	00,0	00,0
Pebruari	00,0	00,0	00,0	00,0
Maret	00,0	00,0	00,0	00,0
April	00,0	00,0	00,0	00,0
Mel	00,0	00,0	00,0	00,0
Juni	00,0	00,0	00,0	00,0
Juli	00,0	00,0	00,0	00,0
Agustus	00,0	00,0	00,0	00,0
September	00,0	00,0	00,0	00,0
Oktober	00,0	00,0	00,0	00,0
November	00,0	00,0	00,0	00,0
Desember	00,0	00,0	00,0	00,0
Tertial	00,0	00,0	00,0	00,0

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
e) Kas Lainnya	00	00

Kas Lainnya merupakan kas milik pemerintah daerah yang dikelola, dikuasai, dan di bawah tanggungjawab seluruh BUD, bendahara penerimaan,

hendakara pengeluaran dan bendahara H/LAD. Saldo kas lainnya yang merupakan sisa dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Regular per 31 Desember 2020 yang dikelola langsung oleh Sekolah Negeri (SD, SMP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel : Mutasi kas lainnya tahun 2021 dan 2020

No	Uraian	2021	2020
1	Pendapatan (Muta BOS	Rp.....	Rp.....
2	Pengeluaran Belanja BOS :		
3	Belanja Pegawai	Rp.....	Rp.....
4	Belanja Barang dan Jasa		
5	- Belanja Persediaan	Rp.....	Rp.....
6	- Belanja Jasa	Rp.....	Rp.....
7	- Belanja Penunjang	Rp.....	Rp.....
8	- Belanja Perjalanan Dinas	Rp.....	Rp.....
9	- Belanja Lainnya	Rp.....	Rp.....
10	Jumlah Belanja Barang dan Jasa (5 s/d 9)	Rp.....	Rp.....
11	Belanja Modal	Rp.....	Rp.....
12	Jumlah Pengeluaran (3+10+11)	Rp.....	Rp.....
13	Sisa Dana BOS tahun berjalan (1(12)	Rp.....	Rp.....
14	Saldo Dana BOS Tahun Lalu	Rp.....	Rp.....
15	Pendapatan bunga bank	Rp.....	Rp.....
16	Biaya anmli bank	(Rp.....)	(Rp.....)
17	Saldo Kas Lainnya per 31 Des. (13+14+(15+16)	Rp.....	Rp.....

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
3) Piutang Pajak	00,0	00,0

Piutang pajak merupakan hak pemerintah daerah atas pendapatan pajak daerah yang sudah diberitkkan surat ketetapan pajak daerah tetapi sampai dengan 31 Desember masih belum diterima. Saldo piutang pajak per 31 Desember 2021 dan 2020, terinci sebagai berikut.

	31 Des. 2021 (Rp)	31 Des. 2020 (Rp)
Piutang pajak reklame	00,0	00,0
Piutang pajak mineral bukan logam	00,0	00,0
Piutang pajak restoran	00,0	00,0
Piutang pajak hiburan	00,0	00,0
Piutang pajak air tanah	00,0	00,0
Piutang PBB P2	00,0	00,0
Piutang pajak penerangan jalan	00,0	00,0
Jumlah	00,0	00,0

a) **Piutang Pajak Reklame**

Pajak reklame merupakan pajak daerah yang pemungutannya berdasarkan Surat Keputusan Pajak Daerah (*Official Assessment*). Saldo Piutang Pajak Reklame per 31 Desember 2021 sebesar Rpxxxxxx terinci sebagai berikut:

Tabel Perkembangan Piutang Pajak Reklame

Tahun NKP	Saldo 31 Des 2020	Penambahan Piutang	Pengurangan Piutang	Saldo 31 Des 2021
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00

Penambahan sebesar Rpxxxxxx merupakan jumlah Surat Keputusan Pajak Reklame yang diterbitkan tahun anggaran 2021. Pengurangan sebesar Rpxxxxxx merupakan Penerimaan piutang di tahun 2021 meliputi piutang periode sebelumnya sebesar Rpxxxxxx dan piutang tahun 2021 sebesar Rpxxxxxx.

Penyisihan piutang pajak reklame tahun 2021 berdasarkan umur piutang terinci sebagai berikut.

Tabel Perhitungan Penyisihan Piutang Pajak Reklame Tahun 2021

Kualitas Piutang	Umur Piutang Pajak	Jumlah (Rp)	% Penyisihan	Penyisihan Piutang Per 31 Des 2021
Lancar	< 1 tahun		0,50%	
Kurang Lancar	1 – 2 tahun		10%	
Ditragakan	> 2 – 5 Tahun		50%	
Mosi	> 5 Tahun		100%	
Jumlah				

b) **Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan**

Pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan menggunakan sistem *Self Assessment*. Saldo piutang pajak mineral bukan logam per 31 Desember 2021 sebesar Rpxxxxxx. Jumlah tersebut merupakan piutang tahun xxxx dan xxxxx yang belum terunggul dengan tahun 2021.

Tabel 1. Perkembangan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam

Tahun NKP	Saldo 31 Des 2020	Penambahan Piutang	Pengurangan Piutang	Saldo 31 Des 2021
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00

Penyisihan piutang pajak mineral bukan logam tahun 2021 berdasarkan umur piutang terinci sebagai berikut.

Tabel 2. Perhitungan Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam Tahun 2021

Kualitas Piutang	Umur Piutang Pajak	Jumlah (Rp)	% Penyisihan	Penyisihan Piutang Per 31 Des 2021
Lancar	< 1 tahun	0,00	0,5%	0,00
Kurang Lancar	1 – 3 tahun	0,00	10%	0,00
Diragukan	> 3 – 5 Tahun	0,00	50%	0,00
Macet	> 5 Tahun	0,00	100%	0,00
Jumlah		0,00		0,00

c) **Piutang Pajak Restoran**

Pajak restoran pemungutannya menggunakan sistem *Self assessment*. Saldo piutang pajak restoran per 31 Desember 2021 sebesar Rp000.000 terinci sebagai berikut:

Tabel 3. Perkembangan Piutang Pajak Restoran

Tahun SKP	Saldo 31 Des 2020	Penambahan Piutang	Pelunasan Piutang	Saldo 31 Des 2021
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00

Penyisihan piutang pajak restoran tahun 2020 berdasarkan umur piutang terinci sebagai berikut:

Tabel 4. Perhitungan Penyisihan Piutang Pajak Restoran Tahun 2021

Kualitas Piutang	Umur Piutang Pajak	Jumlah	% Penyisihan	Penyisihan Piutang Per 31 Des 2021
Lancar	< 1 tahun	0,00	0,50%	0,00
Kurang Lancar	1 – 3 tahun	0,00	10%	0,00
Diragukan	> 3 – 5 Tahun	0,00	50%	0,00
Macet	> 5 Tahun	0,00	100%	0,00
Jumlah		0,00		0,00

Dari screenshot.... terlihat jenis piutang pajak yang telah

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
4) Piutang Retribusi	0,00	0,00

Saldo piutang retribusi per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00 terinci sebagai berikut:

	31 Des 2021	31 Des 2020
Retribusi Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00
Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	0,00	0,00
Piutang Retribusi Pemakaman Kekayaan Daerah	0,00	0,00
Piutang Retribusi Terminal	0,00	0,00
Piutang Retribusi Jln Gangguan (HO)	0,00	0,00
Piutang Retribusi IMA	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00

a) Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan

Saldo Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan Per 31 Desember 2021 sebesar Rp.00000000, terinci sebagai berikut:

Tabel 5. Daftar Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan

No	Kategori Pelayanan Kesehatan	31 Des 2020	Penambahan	Pengurangan	31 Des 2021
1	Laboratorium Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sewa tanah puskesmas untuk ATM (Dinkes)	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pelayanan Kesehatan RSUD Pasirpan	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pelayanan Kesehatan Non Kapas (BPJS Puskesmas)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00

Pertambahan sebesar Rp.000000 meliputi:

- Sebesar Rp.000000 merupakan jasa pelayanan kesehatan yang belum diterima sampai dengan 31 Desember 2021,
- Pelayanan kesehatan non kaplas BPJS di Puskesmas sebesar Rp.000000 yang belum diterima sampai dengan akhir periode akuntansi.

Sedangkan pengurangan sebesar Rp.000000 meliputi:

- Klaim kepada PT. Askes/BPJS yang telah mendapatkan persetujuan pada bulan dan telah di terima tahun 2021,
- Pendapatan sewa tanah puskesmas untuk ATM yang telah diterima sebesar Rp.000000.

Penyisihan piutang retribusi pelayanan kesehatan tahun 2021 berdasarkan umur piutang terinci sebagai berikut.

Tabel ... Perhitungan Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan 2021

No	Jenis Piutang	Saldo 31 Des 2021	Kualitas Piutang			
			Lancar (0,5%)	Kurang Lancar (10%)	Diragukan (50%)	Masak (100%)
1	Piutang Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Pelayanan Kesehatan Non Kepolis (BPJS Puskesmas)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Penyisihan piutang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Piutang (1) + (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Penyisihan Piutang (1) + (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

b) Piutang Retribusi Pelayanan Pasar

Saldo piutang retribusi pelayanan pasar per 31 Desember 2021 sebesar Rp10000000000000 sebagai berikut.

Tabel ... Daftar Piutang Retribusi Pelayanan Pasar Tahun 2021

No	Urutan	Saldo 31 Des 2021	Pembayaran	Pengurangan	Saldo 31 Des 2021
1	Retribusi Pasar Umum				
1	Pasar Daru Lumajang	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Pasar Plaza	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pasar Serangan	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Daftar ...	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah (1)	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Ret. Daftar Utang				
1	Baru Lumajang	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Plaza Lumajang	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Daftar ...	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Ret. Perijinan Pasar				
1	H. Jagatmanan	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sarangan	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pajirana	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Daftar ...	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah (1+2-3)	0,00	0,00	0,00	0,00

Penyisihan piutang retribusi pelayanan pasar tahun 2021 berdasarkan umur piutang adalah sebagai berikut.

Tabel : Perhitungan Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Pajak 2021

Kualitas Piutang	Umur Piutang Retribusi	Jumlah	% Penyisihan	Penyisihan Piutang per 31 Des 2021
Lancar	< 1 bulan	0,00	0,5%	0,00
Kurang Lancar	< 1 – 3 bulan	0,00	10%	0,00
Ditangguhkan	> 3 – 12 bulan	0,00	50%	0,00
Macet	> 12 bulan	0,00	100%	0,00
Jumlah		0,00		0,00

Dari neraca-neraca _____

7) Penyisihan Piutang Tak Tertagih _____
 (.....) (.....)

Berdasarkan saldo piutang per 31 Desember 2021, jumlah penyisihan piutang tak tertagih per 31 Desember 2021 adalah sebesar (Rp.....) dan sebesar (Rp.....) 2020, untuk setiap jenis piutang.

Tabel : Daftar Mutasi Penyisihan Piutang Tahun 2021

Penyisihan Piutang	Saldo Akhir 31 Des 2020	Koreksi tahun Berjalan	Mutasi Bertambah (Berkurang)	Saldo Akhir 31 Des 2021
PENYISIHAN PIUTANG PAJAK				
Penyisihan Piutang Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyisihan Piutang Retribusi	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyisihan Piutang lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Dst....	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH (1+2+3)	0,00	0,00	0,00	0,00

Koreksi tahun berjalan dapat dijelaskan sebagai berikut. (Contoh)

* Sebesar Rp..... merupakan kurang ental penyisihan piutang pajak tahun 2021 atau sebesar 0,5% dari jumlah piutang pajak pencaangan jalan tahun 2021 yang belum di ental yaitu sebesar Rp.....

Mutasi bertentahi (berkurang) sebesar Rp..... merupakan beban penyisihan piutang tahun 2021 (lihat Laporan Operasional).

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
B) Tersedia	<u>1.016.215.800</u>	<u>37.777.540</u>

Saldo persediaan per 31 Desember 2021 dan 2020, merupakan hasil *stock opname* yang diatest dengan metode periodik (fisik). Persediaan yang diperoleh melalui pembelian di ukur sebesar harga perolehan dengan metode harga pembelian terakhir, sedangkan persediaan yang diperoleh melalui *alih-alih* sumbangan menggunakan nilai wajar.

Tabel 5. Laporan Persediaan Per 31 Desember 2021

No	Uraian	Jumlah	
1	Persediaan per 31 Desember 2020		37.777,500
2	Koreksi tahun berjalan atas persediaan awal		00,0
3	Saldo persediaan setelah koreksi (1+2)		37.777,500
4	Ditambah:		
5	Belanja Persediaan LRA 2021	791.021.019,00	
6	Belanja Persediaan belum dibayar (uang belanja)	0,00	
7	Mutasi masuk persediaan di DINKES	101.387.663,68	
8	Perhitungan hibah persediaan	4.019.958.499,00	
9	Jumlah tambahan persediaan (5+6+7+8)	4.912.367.180,68	
10	Dikurangi:		
11	Pembayaran utang belanja persediaan LRA 2021	(0,00)	
12	Perhitungan hibah persediaan	(3.137.421.081,68)	
13	Jumlah tambahan persediaan bersih (11-12)		(0,00)
14	Jumlah persediaan yang siap digunakan (3+9)		4.912.367.180,68
15	Beban Persediaan (Bila Laporan Operasional)		3.933.928.880,68
16	Persediaan tahun 2021 (14-15)		1.078.215.800,00

Tabel 6. Daftar Persediaan Tahun 2021 dan 2020

No	Persediaan	dalam rupiah	
		2021	2020
1	Persediaan Alat Tulis Kantor	8.791.200	4.747.500
2	Persediaan Ruang Cetak	2.861.000	2.450.000
3	Persediaan Material/Bahan	0,00	0,00
4	Persediaan Bahan Sandang	4.139.520	0,00
5	Persediaan Suba Cadang Sarana Mobilitas	0,00	0,00
6	Persediaan Bahan/Bibit Tanaman	0,00	0,00
7	Persediaan Obat-obatan	0,00	0,00
8	Persediaan Bahan Kimia	0,00	0,00
9	Persediaan bahan praktik kegiatan	0,00	0,00
10	Persediaan alat kesehatan/keokteran	0,00	0,00
11	Persediaan kebutuhan bidang kesehatan dan KB pakai habis selah obat-obatan	0,00	0,00

No	Persediaan	2021	2020
12	Persediaan Benda Pos	0,00	0,00
13	Persediaan Peningkat	0,00	0,00
14	Persediaan Bahan Makanan Pakok	0,00	0,00
15	Persediaan Bahan Makanan Pakok	10.850,000	16.500,000
16	Persediaan Alat kebersihan dan Bahan Pembersih	0,00	0,00
17	Persediaan alat listrik dan elektronika (lampu pijar, battery kering)	0,00	0,00
18	Persediaan kebutuhan rumah tangga pakai habis lainnya	0,00	14.000,000
19	Persediaan pupuk dan pembasmi hama	0,00	0,00
20	Bahan Pakas Habis Lainnya	0,00	0,00
21	Alat Peraga dan Mainan	0,00	0,00
22	Persediaan untuk dijual/diserahkan kepada Masyarakat	989.575,000	0,00
	Jumlah	1.016.215,000	37.777,500

b. ASKT TETAP

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1) Aset Tetap	<u>10.830.782.015,16</u>	<u>9.701.710.025,36</u>

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digurakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap milik Pemerintah Kabupaten Lumajang meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan.

Seluruh aset tetap milik pemerintah kabupaten Lumajang disusutkan, kecuali tanah, aset tetap lainnya seperti alat musik modern dan aset tetap renovasi, dan konstruksi dalam pengerjaan. Atas dasar pertimbangan kepraktisan, penerapan metode penyusutan sebagai berikut:

- Metode penyusutan garis lurus (*straight line*)
- Dalam menghitung penyusutan nilai dan aset tetap di akhir masa manfaatnya diabaikan.
- Aset tetap disusutkan satu tahun penuh tanpa melihat tanggal dan bulan perolehan aset tetap (pendekatan tahunan).
- Perubahan nilai aset tetap akibat penambahan/pengurangan biaya dan atau nilai aset tetap, maka penambahan/pengurangan tersebut dikapitalisasi ke dalam nilai yang dapat disusutkan.
- Masa manfaat aset tetap telah ditetapkan dalam kebijakan akuntansi dan tidak dapat diubah kecuali (1) terjadi perubahan karakteristik fisik/penggunaan aset tetap; (2) terjadi perbaikan aset tetap yang menambah masa manfaat atau kapasitas manfaat; atau (3) terdapat ketelitian dalam penentuan masa manfaat aset tetap yang baru diketahui di kemudian hari.

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
(a) Tanah	<u>2.892.421.800</u>	<u>2.248.212.000</u>

Saldo aset tetap tanah per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp 2.892.421.800 dan 2.248.212.000, terinci sebagai berikut:

Tabel Daftar Mutasi Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2021 dan 2020

No	Uraian	Saldo Awal 31 Des 2020	Koreksi	Mutasi		Saldo 31 Des 2021
				Bertambah	Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7
1	Tanah A	2.248.212.000	0,00	671.742.800,00	27.153,000	2.892.421,800
2	Tanah B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Tanah C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Jah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	2.248.212,000	0,00	671.742.800,00	27.153,000	2.892.421,800

Selanjutnya jelaskan:

- Kureksi aset tetap tanah beserta alasan koreksi
- Peningkatan aset tetap tanah diperoleh dari transaksi apa?
- Pengurangan aset tetap tanah disebabkan karena apa?

Juga jelaskan hal-hal lain yang berkaitan dengan permasalahan aset tetap tanah

- Contoh :
- Jumlah bidang tanah yang sudah bersertifikat
 - Jumlah bidang tanah yang belum bersertifikat
 - Tanah dalam sengketa (jika ada)
 - Tanah yang di pinjam pakai
 - dll

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
(b) Peralatan dan Mesin	<u>3.077.947.550,00</u>	<u>2.890.079.400</u>

Saldo aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp. 3.077.947.550 dan Rp. 2.890.079.400, terinci sebagai berikut:

Tabel Daftar Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 dan 2019

No	Peralatan dan mesin	Saldo Awal 31 Des 2020	Koreksi	Mutasi		Saldo 31 Des 2021
				Bertambah	Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7
1	Alat-alat besar	77.920.000	0,00	0,00	0,00	77.920.000
2	Alat-alat Angkutan	1.201.797.000	0,00	0,00	0,00	1.201.797,000
3	Alat-alat rumah dan Alat Ukur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Alat-alat Perbaikan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	894.755,200	0,00	89.174,000	0,00	977.409,200

No	Peralatan dan mesin	Saldo Awal 31 Des 2020	Koreksi	Mutasi		Saldo 31 Des 2021
				Bertambah	Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7
	Akt komputer	672.814.400		93.419.000		766.103.400
6	Alet-alat Studio dan Komunikasi	31.500.000	0,00	0,00	0,00	31.500.000
7	Akt-Alat Keakademi	10.492.700	0,00	6.225.150	0,00	14.717.850
8	Akt-Alat Laboratorium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Akt-Alat Pemasangan dan Kebersihan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	2.091.117.100	0,00	100.044.150,00	0,00	3.071.847.250,00

Selanjutnya jelaskan :

- Koreskai saat setiap peralatan dan mesin beserta alasan koreskai.
- Pembentukan any setiap peralatan dan mesin diperoleh dari transaksi apa?
- Penghapusan aset tetap peralatan dan mesin disebabkan karena apa?

Juga jelaskan hal-hal lain yang berkaitan dengan permasalahan aset tetap peralatan dan mesin

Contoh :

- Jumlah peralatan dan mesin yang rusak berat
- Jumlah peralatan dan mesin yang dipinjam pakai
- Dll

.....

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
(c) Gedung dan Bangunan	<u>4.794.365.565,16</u>	<u>4.497.370.625,36</u>

Gedung dan bangunan meliputi bangunan gedung dan minuman. Saldo gedung dan bangunan per 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut

Tabel Daftar Perbandingan Jenis Aset Tetap Gedung dan Bangunan
Per 31 Desember 2020

dalam rupiah

No	Gedung dan Bangunan	Saldo Awal 31 Des 2020	Koreksi	Mutasi		Saldo 31 Des 2021
				Bertambah	Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7
1	Bangunan Gedung	7.759.738.025,36	0,00	648.404.038,00	751.800.000	4.167.737.105,16
2	Minuman	727.632.000,00	0,00	0,00	0,00	727.632.000,00
	Jumlah	3.894.147.625,36	0,00	913.223.000	0,00	4.497.370.625,36

.....

Koreksi aset tetap gedung dan bangunan sebagai berikut:

- Koreksi gedung dan bangunan karena kurang catil sebesar Rp.0
- Koreksi gedung dan bangunan karena lebih catil sebesar Rp. 0

Penambahan gedung dan bangunan sebesar Rp. 913.223,000 meliputi:

- Penambahan dari mutasi sebesar Rp. 648.494.939,00
- Penambahan dari hibah Rp. 0
- Penambahan dari belanja barang Rp. 0

Pengurangan gedung dan bangunan sebesar Rp. 0 sebagai berikut:

- Pengurangan karena penghapusan Rp. 0
- Pengurangan karena dihibahkan Rp. 0
- Pengurangan karena mutasi keluar Rp. 351.500,000

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
(a) Jalan, Irigasi & Jaringan	66.048.000	66.048.000

Jumlah aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan milik Pemerintah Kabupaten Lumajang terinci pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1. Daftar Jenis Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Milik Pemerintah Kabupaten Lumajang per 31 Desember 2020

No	Jenis	Saldo 31 Desember 2020	Koreksi	Penambahan	Pengurang	Saldo 31 Desember 2020
1	Jalan	66.048.000		00,0	00,0	66.048.000
2	Jembatan	00,0		00,0	00,0	00,0
3	Bangunan Air/Irigasi	00,0		00,0	00,0	00,0
4	Instalasi	00,0		00,0	00,0	00,0
5	Jaringan	00,0		00,0	00,0	00,0
	Jumlah	00,0		00,0	00,0	00,0

Koreksi aset tetap jalan, irigasi dan jaringan sebagai berikut :

- Koreksi jalan, irigasi dan jaringan karena kurang catil sebesar Rp.0
- Koreksi jalan, irigasi dan jaringan karena lebih catil sebesar Rp. 0

Penambahan gedung dan bangunan sebesar Rp.0 meliputi :

- Penambahan dari belanja modal sebesar Rp. 0
- Penambahan dari hibah Rp.0
- Penambahan dari belanja barang Rp. 0

Pengurangan jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp. 0 sebagai berikut :

- Pengurangan karena penghapusan Rp.0
- Pengurangan karena

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
(e) Aset Tetap Lainnya	00,0	00,0

Saldo Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 Menasi aset tetap lainnya sebagai berikut,

Tabel Daftar Perbandingan Jenis Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021
dalam rupiah

No	Jenis	31 Des 2020	Koreksi	Poinbaha lan	Pengurang an	31 Des 2020
1	Buku dan Pustaka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Barang Bercorak Kesantia/Kebud ayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Hewan Ternak dan Tanaman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Perubahan saldo Aset Tetap Lainnya selama tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Pembelian aset tetap lainnya sebesar Rp. 0 berasal dari:

- (1) Realisasi belanja modal Aset Tetap Lainnya yang bersumber dari APBD tahun 2021 sebesar Rp. 0 dengan rincian sebagai berikut.
- (2) Hibah huku berasal dari sebesar Rp.0
- (3) Laci

Sedangkan pengurangan aset tetap lainnya merupakan penghapusan dengan SK Bupati No. tahun....., berinci sebagai berikut:

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
(f) Konstruksi Dalam Pengerjaan	00,0	00,0

Saldo Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 Menasi aset tetap lainnya sebagai berikut:

Tabel 4.11 Daftar Perkembangan Jenis Aset Tetap KDP per 31 Desember 2021

No	Jenis	dalam rupiah				
		31 Des 2020	Koreksi	Penambahan	Pengurangan	31 Des 2021
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Selengkapnya jenis-jenis secara terinci koreksi KDP, penambahan dan pengurangannya:

c. ASSET LAINNYA

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1) Aset Lainnya	77.637.000	77.637.000

Aset lainnya merupakan aset yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi permanen maupun aset tetap. Saldo Aset Lainnya Per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 0,00 sedangkan saldo Per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 0,00 terinci sebagai berikut:

Tabel 4.12 Daftar Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2021

No	Jenis	dalam rupiah			
		31 Desember 2020	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2021
1	Tuntutan Ganti Rugi	00,0	00,0	00,0	00,0
2	Aset Tak Berwujud	00,0	00,0	00,0	00,0
3	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	00,0	00,0	00,0	00,0
4	Aset Lain lain	77.637.000	00,0	00,0	77.637.000
	Jumlah	77.637.000	00,0	00,0	77.637.000

Jenis-jenis masing-masing jenis aset lainnya secara terinci baik penambahan dan pengurangannya, termasuk amortisasi APK.

d. KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran ke luar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban diklasifikasikan atas kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika

dihentikan dibayar dalam waktu 22 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sesuai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban pemerintah daerah per 31 Desember 2021 dan 2020 berupa utang masing-masing tercatat sebesar Rp. 83.366.323 dan Rp. 71.327.903 diuraikan sebagai berikut.

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1) Kewajiban Jangka Pendek	83.366.323	71.327.903

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban utang yang belum dibayar sampai dengan akhir periode akuntansi. Kewajiban jangka pendek meliputi utang perhitungan Pihak ketiga (PFK), pendapatan diterima di muka dan utang belanja. Saldo kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp. 83.366.323 dan Rp. 71.327.903. Kewajiban jangka pendek tersebut meliputi utang PFK, pendapatan diterima di muka dan utang belanja.

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
(a) Utang PFK	0,0	0,0

Utang PFK timbul karena pelaksanaan aktivitas non anggaran meliputi penerimaan dan pengeluaran kas atas potongan (potongan SP2D baik oleh bendahara pengeluaran maupun bendahara umum daerah.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 utang PFK masing-masing sebesar Rp.0,0 dan Rp. 0 terinci sebagai berikut,

Tabel 4.10. Daftar Rincian Utang PFK per 31 Desember 2020

No	Jenis	data riil			31 Desember 2021
		31 Desember 2020	Pungutan	Penyetoran	
1	PPH ps21	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PPH. Ps. 22	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PPN	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ds	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
(b) Pendapatan Diterima Dimuka	00,0	00,0

Pemerintah daerah menggunakan pendekatan pendapatan dalam mencatat transaksi pendapatan daerah. Dengan pendekatan pendapatan, maka setiap penerimaan pendapatan daerah seluruhnya di awal dan dicatat sebagai pendapatan meskipun terdapat kemungkinan dari pendapatan yang diterima belum menjadi hak pemerintah daerah.

Pendapatan diterima di muka merupakan pendapatan daerah yang sudah diterima di rekening kas umum daerah, tetapi pemerintah daerah belum punya hak atas pendapatan tersebut. Pada akhir periode akuntansi pemerintah daerah akan melaporkan di neraca atas pendapatan yang belum menjadi hak tetapi sudah diterima sebagai pendapatan diterima di muka.

Pada akhir tahun 2021 dan 2020 saldo pendapatan diterima di muka masing-masing sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00 yang merupakan pendapatan diterima dimuka atas sewa AUM, Pendapatan Parkir Herlangganan, Pendapatan diterima dimuka atas sewa gedung. Jumlah tersebut tercatat di beberapa entitas akuntansi sebagai berikut.

Tabel Daftar Rincian Pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2021

No	Jenis	Desember 2021			31 Desember 2021
		31 Desember 2020	Penambahan	pengurangan	
1	Pendapatan Sewa	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Parkir herlangganan	0,00	0,00	0,00	0,00
3	dll	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00

Jelaskan penambahan dan pengurangan tersebut secara rinci...

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
(c) Utang Lain-lain	00,0	00,0

Utang lain adalah kewajiban lancar pemerintah daerah yang belum dibayar sampai dengan tanggal pelaporan keuangan meliputi:

- Utang bagi hasil Pajak Daerah ke desa sebesar Rp.0,00, merupakan bagi hasil pajak daerah tahun 2021 yang belum di salurkan kepada Desa sampai dengan tanggal pelaporan.
- Utang bagi Hasil Pendapatan Lainnya Rp. 0,00 merupakan bagi hasil rentansi daerah ke desa tahun 2021 yang belum di salurkan kepada Desa sampai dengan tanggal pelaporan.

- Utang Dana Desa sebesar Rp. 0,00, merupakan Dana Desa tahun 2021 yang belum dibayarkan ke Desa. Total penerimaan Dana Desa tahun 2021 sebesar Rp. 0,00 dan jumlah yang sudah diantarkan sebesar Rp. 0,00

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
(d) Utang Belanja	83.366.323	71.327.903

Utang belanja adalah kewajiban lancar pemerintah daerah yang belum dibayar sampai dengan tanggal pelaporan rekening. Misalnya utang belanja pegawai, barang dan jasa serta belanja modal.

Saldo utang belanja per 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp. 83.366.323 terdiri dari utang belanja pegawai sebesar Rp. 76.151.215 utang belanja jasa Rp. 7.215.108 dan utang belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp. 0,00, sebagaimana tabel dibawah,

Tabel Rincian Utang Tahun 2021

No	Jenis Utang	31 Des 2020	Pemambahan 2020	Pengurangan 2020	31 Des 2021
1	Utang Belanja pegawai	63.945.228	0,00	0,00	76.151.215
2	Utang Belanja Jasa	7.212.675	0,00	0,00	7.215.108
3	Utang Belanja Pemeliharaan	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	71.327.903	0,00	0,00	81.366.323

Selanjutnya jelaskan dan sahkan status riak yang-rup suatu utang belanja tersebut.

Utang Belanja Pegawai

Saldo utang belanja pegawai per 31 Desember 2021 sebesar Rp 76.151.215 merupakan kewajiban atas Tunjangan Pokok Penghasilan bulan Desember 2021 yang belum dibayar sampai dengan akhir periode akuntansi.

Tabel Rincian Utang Belanja Pegawai Tahun 2021

No	Jenis Utang	31 Des 2020	Pemambahan 2020	Pengurangan 2020	31 Des 2021
1	Utang Jasa Layanan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Utang TPP	63.970.128	0,00	0,00	76.151.215
3	Utang Gaji	1.215.100	0,00	0,00	0,00
4	dll	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	63.945.228	0,00	0,00	76.151.215

Utang Belanja Jasa

Saldo utang belanja per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 7.213.108 merupakan kewajiban atas jasa yang telah dikonsumsi/diterima seperti jasa atas pemeliharaan listrik PLN, telepon, air PDAM, internet dan jasa lainnya yang belum dibayar sampai dengan akhir periode akuntansi, terinci sebagai berikut:

Tabel Rincian Utang Belanja Jasa Tahun 2021

No	Jenis Utang	31 Des 2020	Penambahan 2021	Pengurangan 2021	31 Des 2021
1	Jasa listrik	3.379.486	0,00	0,00	4.840.848
2	Jasa telepon	110.689	0,00	0,00	89.160
3	PDAM	525.506	0,00	0,00	918.100
4	internet	1.367.000	0,00	0,00	1.367.000
	Jumlah	7.382.671	0,00	0,00	7.213.108

Dari seferentnya, besarnya jenis utang belanja jasa per 31 des 2021 (juta rrb)

w. EKUITAS

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
1) Ekuitas	<u>5.688.732.331,67</u>	<u>5.688.732.331,67</u>

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah, merupakan selisih antara jumlah aset dan jumlah kewajiban pemerintah. Saldo ekuitas per 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut:

Tabel Daftar Ekuitas per 31 Desember 2021 dan 2020

No	Akan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	Jumlah Aset	6.624.249.581,71	5.760.060.234,67
2	Jumlah Kewajiban	83.366.323,00	71.327.903,00
3	Ekuitas (1-2)	<u>6.540.883.258,71</u>	<u>5.688.732.331,67</u>

Ekuitas meliputi ekuitas awal ditambah surplus (defisit) LO dan ditambah/dikurangi dengan dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi/kesalahan mendasar, sebagai berikut.

Tabel 7.1a Rincian Rincian Ekuitas Pemerintah Kabupaten Lumajang per 31 Desember 2021 dan 2020

<i>dalam rupiah</i>			
No	Uraian	2021	2020
1	Ekuitas Awal	0,00	0,00
2	Surplus (Defisit) LO	(14.436.700.822,84)	(4.714.240.846,00)
3	Dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi / keaslian dasar	0,00	0,00
4	Lain-lain	0,00	999.271.500,00
5	BK-PTKD	26.298.436.839,68	4.020,914.273,00
6	EKUITAS AKHIR	7.861.736.016,84	1.194.944.427,00

Rincian dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi/keaslian mendasar sebagaimana dijelaskan di dalam penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas.

1.3 PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang terakumulasi dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya dibandingkan dengan periode sebelumnya.

a. Pendapatan LO

Pendapatan Asli Daerah – LO

Dinas Sosial Kab. Lumajang bukan Dinas Penghasil sehingga tidak ada Pendapatan yang harus di masukkan dalam Pendapatan Asli Daerah

b. BEBAN

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1) Beban Pegawai-LO	<u>3.384.191.656</u>	<u>2.520.631.468</u>

Jumlah tersebut merupakan beban pegawai yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah tahun 2021 dan 2020, sebagai berikut.

Tabel 8. Perhitungan Beban Pegawai Tahun 2021 dan 2020

Uraian	dalam rupiah	
	2021	2020
Belanja Gaji Pegawai LRA	2.571.986.669	2.132.118.101
DITAMBAH : Beban Pegawai Yang Masih Harus Dibayar		
Kekurangan gaji dan tunjangan pegawai (gaji pokok, dll)/Gaji sewan	0,00	1.215,100
Utang Gonor PNS 2017 belum dibayar (RSL.D Dr. Haryoto)	0,00	0,00
Tunjangan TPP bulan Desember 2021 belum di bayar	26.151.213	62.730,128
Honorarium Pelayanan Kesehatan 2017 Belum Dibayar (PNS)	0,00	0,00
Honorarium Pelayanan Kesehatan 2017 Belum Dibayar (Non PNS)	0,00	0,00
Beban pegawai tahun lalu yang belum dibayar (utang belanja)	0,00	0,00
Beban pegawai BOS	0,00	0,00
DIKURANGI :		
Pembayaran Kekurangan gaji dan tunjangan pegawai (gaji pokok, dll)/Gaji sewan	(1.215.100)	(0,00)
TPP Desember 2020 yang dibayarkan di 2021	(62.730.128)	(66.432,261)
Jumlah Belanja Pegawai LO	2.364.192,656	2.224,965,207

Tabel 9. Daftar Pembayaran Utang Beban Pegawai Tahun Lalu

No	Nama SKPD	dalam rupiah	
		2021	2020
1	Dinas Sosial	1.215.100	

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
2) Beban Barang dan Jasa-LO	5.353.187.459,68	8.149.846.131

Beban barang dan jasa yang menjadi beban Pemerintah Daerah meliputi beban beban persediaan, beban jasa, beban perjalanan dinas, beban pemeliharaan dan beban lain-lain. Saldo per 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut.

Tabel 10. Beban Harung dan Jasa Tahun 2021 dan 2020

dalam rupiah

No	Beban Beban Harung dan Jasa	Tahun 2021	Tahun 2020
1	Beban Persediaan	3.933.928.880,68	6.866.381.890
2	Beban Jasa	853.589.999,00	833.945.129
3	Beban Pemeliharaan	178.830.600,00	171.502.962
4	Beban Perjalanan Dinas	379.338.020,00	222.277.890
5	Beban Lainnya	7.230.000,00	5.739.000
	Jumlah	5.583.987.499,68	8.119.846.881

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
3) Beban Hibah-LO	<u>1.100.000,000</u>	<u>1.142.846.181</u>

Tabel 11. Daftar Rincian Beban Hibah Tahun 2021 dan 2020

dalam rupiah

No	Beban Lainnya	2021	2020
1	Beban Hibah kepada badan dan lembaga, sukarela dan sosial yang dibenarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan (Bantuan kepada PMI dan GENDARA)	1.100.000,000	0,00
	Jumlah	<u>1.100.000,000</u>	<u>0,00</u>

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
4) Beban Bantuan Sosial-LO	<u>9.198.637,500</u>	<u>0,00</u>

Tabel 12. Daftar Rincian Beban Bantuan Sosial Tahun 2021 dan 2020

dalam rupiah

No	Beban Lainnya	2021	2020
1	Beban Bantuan sosial yang yang direncanakan kepada individu	4.964.800,000	0,00
2	Beban Bantuan sosial barang yang direncanakan kepada keluarga	1.115.230,500	0,00
3	Beban Bantuan sosial yang yang direncanakan kepada lembaga non pemerintah (bidang pendidikan keagamaan dan bidang lainnya	4.122.600,000	0,00
	Jumlah	<u>9.198.637,500</u>	<u>0,00</u>

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
5) Beban Penyusutan-LO	<u>440.641.765,96</u>	<u>0,00</u>

Tabel 13. Daftar Rincian Beban Penyusutan Tahun 2021 dan 2020

		dalam rupiah	
No.	Beban Lainnya	2021	2020
1	Beban penyusutan peralatan dan mesin	318.923.520,00	0,00
2	Beban penyusutan gedung dan bangunan	116.013.445,96	0,00
3	Beban penyusutan jalan, irigasi dan jaringan	6.604.800,00	0,00
	Jumlah	440.641.765,96	0,00

1.4 PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
a. Ekuitas Awal	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Saldo ekuitas awal tahun 2021 sebesar Rp. 0,00 merupakan ekuitas yang sebelumnya telah disajikan di Neraca tahun 2021 awal. Sedangkan ekuitas awal tahun 2021 sebesar Rp. 0,00 merupakan ekuitas yang telah disajikan di Neraca 2021 awal.

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
b. Surplus (Defisit) LO	<u>15.344.888.299,96</u>	<u>(4.714.240.846,00)</u>

Surplus (defisit) LO adalah selisih antara pendapatan LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus (defisit) dari kegiatan non-operasional dan pajak luar biasa. Surplus/defisit LO untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, sebagai berikut.

Tabel 14. Surplus/Defisit LO
Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

		<i>Saluran regional</i>	
No	Uraian	2021	2020
1	Perolehan LO	0,00	6.249.003.000,00
2	Beban	15.344.888.299,96	11.461.673.753,68
3	Surplus/Defisit Eku Operasional (1-2)	15.344.888.299,96	(5.212.670.753,68)
4	Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional	0,00	0,00
5	Pes Luar Biasa	0,00	0,00
6	Surplus/Defisit L.O. (3+4+5)	15.344.888.299,96	(5.212.670.753,68)

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi Keseluruhan Masa Depan	0,00	0,00

Pada Tahun 2021 telah dilakukan koreksi berjalan atas saldo awal Tahun 2020 yang berdampak pada penurunan akuitas sebesar Rp. 0,00. Koreksi merupakan tindakan pembetulan secara akuntansi agar akuitas yang disajikan dalam laporan keuangan menjadi sesuai dengan yang sebenarnya.

Koreksi kesalahan saldo awal yang berdampak pada penurunan akuitas awal sebesar Rp.0,00 antara lain:

- 1) Koreksi Nilai Pajak Penerang Jalan Rp. 0,00
- 2) Koreksi Nilai Penyisihan Piutang (Rp. 0,00);
- 3) Koreksi Nilai Persediaan (Rp. 0,00);
- 4) Koreksi Nilai Aset Tetap Tanah Rp. 0,00
- 5) Koreksi Nilai Aset Tetap Perakitan dan Mesin (Rp. 0,00);
- 6) Koreksi Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan (Rp. 0,00);
- 7) Koreksi Nilai Aset Tetap Jalan dan Irigasi Rp. 0,00;
- 8) Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan Perakitan dan Mesin (Rp. 0,00);
- 9) Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan (Rp. 0,00);
- 10) Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan Jaringan, Jalan dan Irigasi Rp. 0,00;
- 11) Koreksi Nilai Bantuan Sosial Rugi (Rp. 0,00);
- 12) Koreksi Nilai Akumulasi Amortisasi (Rp. 0,00);
- 13) Koreksi Nilai Aset Lain-lain (Rp. 0,00); dan
- 14) Koreksi Nilai Pendapatan Diterima Dimuka Rp. 0,00.

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
d. Ekuitas Akhir	<u>15.344.888.299,96</u>	<u>1.194.944.427,00</u>

Saldo ekuitas akhir per 31 Desember 2021 dan 2020, meliputi saldo awal ekuitas di tambah surplus (defisit) LO dan dampak kumulatif atas koreksi kesalahan mendasar periode sebelumnya, sebagai berikut.

Tabel 15. Laporan Perubahan Ekuitas

No	Keterangan	Saldo (Rp)	
		2021	2020
1	Ekuitas Awal	0,00	0,00
2	Surplus (defisit) LO	15.344.888.299,96	(4.714.240.846,00)
3	Dampak Kumulatif Koreksi Kesalahan Mendasar	0,00	0,00
4	Lain-lain	0,00	979.271.000,00
5	RK-PPKT	0,00	4.929.914.373,00
6	Ekuitas Akhir	<u>15.344.888.299,96</u>	<u>1.194.944.427,00</u>

IV. INFORMASI NON KEUANGAN

a. GAMBARAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG

a. SEJARAH KABUPATEN LUMAJANG

Nama Lumajang berasal dari "LAMAJANG" yang diketahui dari penelusuran sejarah, data prasasti, naskah-naskah kuno, bukti-bukti petilasan dan hasil kajian pada beberapa seminar dalam rangka menetapkan hari jadinya. Beberapa bukti peninggalan yang ada antara lain:

- 1) Prasasti Mula Malurung
- 2) Naskah Negara Kertagama
- 3) Kitab Pararaton
- 4) Kidung Harsa Wijaya
- 5) Kitab Pujangga Manik
- 6) Serat Babat Tanah Jawi
- 7) Serat Kanda

Karena Prasasti Mula Manurung dinyatakan sebagai prasasti tertua dan pernah menyebut-nyebut "Negara Lamajang" maka dianggap sebagai titik tolak pertimbangan hari jadi Lumajang. Prasasti Mula Manurung mempunyai 12 lempengan tembaga. Pada lempengan VII halaman a baris 1 - 3 prasasti Mula Manurung menyebutkan "Sira Nararyya Sminingrat, pinralista juru Lamajang pinasangaken jagat palaku, ngkaneng nagara Lamajang" yang artinya: Beliau Nararyya Sminingrat (Wisnuwardhana) ditetapkan menjadi juru di Lamajang diangkat menjadi pelindung dunia di Negara Lamajang tahun 1177 Saka pada Prasasti tersebut setelah diadakan penelitian/ penghitungan kalender kuno maka ditemukan dalam tahun Jawa pada tanggal 14 Dulkaidah 1165 atau tanggal 15 Desember 1255 M.

Mengingat keberadaan Negara Lamajang sudah cukup meyakinkan bahwa 1255M itu Lamajang sudah merupakan sebuah negara berpenduduk, mempunyai wilayah, mempunyai raja (pemimpin) dan pemerintahan yang teratur, maka ditetapkanlah tanggal 15 Desember 1255 M sebagai hari jadi Lumajang yang dituangkan dalam Keputusan Bupati Kepala Derah Tingkat II Lumajang Nomor 414 Tahun 1990 tanggal 20 Oktober 1990

Nararyya Kirana penguasa Lamajang sejak tahun 1255 M berurutan digantikan oleh penguasa-penguasa selanjutnya sesuai dengan jaman yang merangkumnya. Selanjutnya, pada perjalanan pemerintahan Kabupaten Lumajang berturut-turut dipimpin oleh:

- 1) KRY Kertodirejo (1928-1941);
- 2) R. Abu Bakar (1941-1948);
- 3) R. Sastrodikoro (1948-1959);
- 4) R. Sukardjono (1959-1966);
- 5) N.G. Subowo (1966-1973);
- 6) Suwandi (1973-1983);
- 7) Karsid (1983-1988);
- 8) H.M. Samsi Ridwan (1988-1993);
- 9) Tarmin ariyadi (1993-1998);

- 10) Drs. H. Achmad Fauzi (1998-2003);
- 11) Drs. H. Achmad Fauzi - H. Hartono, ST, S.Sos (2003-2008);
- 12) DR. H. Sjahrudin Masdar, MA - Drs. As'at (2008-2013);
- 13) DR. H. Sjahrudin Masdar, MA - Drs. As'at (2013-2018);
- 14) Drs. Ag'at, S.Pd - dr. Hartono Suprianto, M.Kes (2014-2018)

b. VISI DAN MISI KABUPATEN LUMAJANG

Visi Kabupaten Lumajang:

"TERWUJUDNYA MASYARAKAT LUMAJANG YANG SEJAHTERA, DAN BERKARIBABAT."

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Kabupaten Lumajang memiliki misi sebagai berikut.

- 1) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan perekonomian daerah dengan pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan, memelihara iklim usaha yang kondusif, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pelaku ekonomi.
- 2) Meningkatkan masyarakat yang bermartabat melalui peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dengan peningkatan sumber daya manusia dan profesionalisme aparatur.
- 3) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan kehidupan beragama, kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, penguatan sosial dan pengentasan kemiskinan.

c. LETAK GEOGRAFIS DAN BATAS WILAYAH

Kabupaten Lumajang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang terletak pada koordinat 112° 5' - 113° 22' Bujur Timur dan 7° 52' - 8° 23' Lintang Selatan. Luas wilayah Kabupaten Lumajang 1.790,90 KM² atau 3,74% dari luas Provinsi Jawa Timur. Ketinggian daerah bervariasi dari 0 - 3.476 m dengan daerah yang terluas adalah pada ketinggian 100 - 500 m dari permukaan laut (dpl) seluas 67.405,50 Ha (33,88 %) dan yang tersempit adalah pada ketinggian 0 - 25 m dari permukaan laut yaitu 19.779,45 Ha atau 11,04% dari luas wilayah Lumajang.

Batas-batas wilayah administrasi Kabupaten Lumajang, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo, sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Jember, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Malang. Secara administrasi wilayah Kabupaten Lumajang meliputi 21 (dua puluh satu) wilayah kecamatan.

d. KLIMATOLOGI DAN HIDROLOGI

Lokasi Kabupaten Lumajang yang berada di sekitar garis khatulistiwa menyebabkan mempunyai perubahan iklim dua jenis setiap tahun, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Untuk musim kemarau berkisar pada bulan April hingga Oktober, sedangkan musim penghujan dari bulan Oktober hingga April.

Daerah Lumajang mempunyai 3 tipe iklim yaitu agak basah, sedang dan agak kering. Untuk tipe basah jumlah hujan kering rata-rata 3 bulan setahun yang mencakup daerah Gresik, Sempur, sebagian Pasirian, Candipuro, Pronoharjo, dan

Gunung Semeru. Untuk daerah dengan kategori sedang mencakup daerah Ranuyasa, Klakah, Kedungjajang, Sekelana, Lumajang, Juriroto dan Rowokangkung dengan rata-rata bulan kering 3-4 bulan pertumbuhannya. Sedang daerah dengan iklim agak kering meliputi Tekung, Kunir dan Yosowilangun.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh Balai Pengkajian Sumber Daya Air Wilayah sungai Bondoyudo-Mataram di Lumajang dalam kurun waktu setahun ini rata-rata hari hujan berkisar 1 sampai dengan 24 hari tiap hutannya. Pada tahun 2000 curah hujan tertinggi terdapat di Kecamatan Randugung dengan hari hujan 109 hari, sedangkan curah hujan terendah terdapat di Kecamatan Gacjalit dengan hari hujan 34 hari.

e. TOPOGRAFI

Topografi Kabupaten Lumajang terbagi dalam 4 daerah yaitu; daerah gunung, pegunungan, dataran banjir dan dataran alluvial. Perantara daerah Gunung Semeru dan Gunung Lingsong, untuk kategori yang kedua Ranuyasa, Tempursari, sekitar Gunung Semeru sekitar Gunung Tengger dan Lingsong. Kecamatan yang termasuk dalam kategori ketiga adalah Lumajang, Sumberubo dan Sukodana. Kategori terakhir Kecamatan Rowokangkung, Juriroto, Yosowilangun dan sepanjang pantai mulai dari Yosowilangun sampai dengan Tempursari.

Kabupaten Lumajang terdiri dari dataran yang subur karena diapit oleh tiga gunung berapi yaitu Gunung Semeru (3.676m), Gunung Bromo (3.207m) dan Gunung Lingsong. Untuk kawasan selatan daerahnya sangat subur karena mendapat endapan vulkanik dari gunung-gunung yang mengalirinya. Ada beberapa sungai yang mengalir di kawasan tersebut yaitu Kali Glidik, Kali Hawan, Kali Gedda, Kali Regoyn, Rejali, Basuk Set, Kali mujur dan Bondoyudo.

Ketinggian daerah Kabupaten Lumajang bervariasi dari 0 sampai dengan diatas 2000 m diatas permukaan laut, dengan daerah yang terluas adalah ketinggian 100 – 500 m dan permukaan laut (dpl) 63.100,13 ha (5,24%) dan yang tersempit adalah pada ketinggian > 2000 m dari permukaan laut yaitu 6.809,4 ha atau 3,82% dari luas wilayah Kabupaten Lumajang.

f. TATA GUNA TANAH

Luas wilayah administratif Kabupaten Lumajang adalah 179.090 ha yang terbagi menjadi 21 kecamatan dan 204 desa dan kelurahan. Tata guna tanah wilayah Kabupaten Lumajang meliputi:

- 1) daerah pemukiman seluas 20.721 ha (11,57%);
- 2) lahan sawah seluas 34.672 ha (19,36%);
- 3) tegal seluas 59.792 ha (33,39%);
- 4) perkubatan seluas 12.109 ha (6,76%);
- 5) hutan seluas 52.303 ha (29,20%);
- 6) dan lainnya seluas 1.190 ha (0,69%).

Hutan merupakan daerah yang berfungsi sebagai daerah penyimpan air dan daerah penyangga yang berfungsi untuk keseimbangan alam. Namun hutan juga dapat dieksploitasi sehingga memberi manfaat ekonomi. Hutan di Kabupaten Lumajang dibagi ke dalam empat fungsi, yaitu hutan lindung seluas 11.127,60Ha, hutan produksi seluas 22.964,20Ha, hutan rakyat dan hutan konservasi lainnya seluas 30.033,20Ha.

2. STRUKTUR KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA

C) STRUKTUR KELEMBAGAAN

Sesuai dengan berlakunya Otonomi Daerah, Pemerintah Kabupaten Lumajang telah menindaklanjuti dengan penataan struktur kelembagaan organisasi pemerintah yaitu dengan menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dengan cara mereformasi atau restrukturisasi kelembagaan. Reformasi birokrasi dimaksudkan untuk memenuhi perkembangan kebutuhan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan untuk mempermudah akses pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Reformasi birokrasi juga bertujuan untuk menciptakan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat.

Penataan dimaksudkan agar pemerintahan dapat berfungsi secara lebih memadai, efektif, dengan struktur yang lebih proporsional, ramping, luwes dan responsif. Disamping itu, yang tidak kalah pentingnya adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur agar lebih profesional sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

Penataan kelembagaan struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Lumajang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2016, terdiri dari dua Sekretariat yakni Sekretariat Daerah dan Sekretaris DPRD. Sekretariat Daerah terdiri atas 3 Asisten dan 10 Bagian. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang pada tahun 2017 telah berganti dengan Struktur Organisasi yang baru.

Kabupaten Lumajang terdiri dari 21 kecamatan dan pada tingkat berikutnya, Kabupaten Lumajang terdiri dari 205 Desa/Kelurahan, 1.713 RW dan 6.888 RT.

V. PENUTUP

Beberapa kesimpulan penting yang dapat diuraikan terkait dengan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lumajang tahun anggaran 2020 sebagai berikut.

1. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lumajang tahun 2020 disusun untuk memenuhi beberapa peranan antara lain akuntabilitas, manajerial, transparansi dan keseimbangan antar generasi (*Intergenerational Equity*).
2. Disamping sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD, secara umum tujuan dari penyusunan laporan keuangan tahun 2020 adalah untuk menyediakan informasi tentang:
 - a) Kemampuan Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam merealisasi pendapatan dari yang dianggarkan.
 - b) Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Lumajang berdasarkan anggaran belanja yang telah ditetapkan.
 - c) Sumber-sumber pembiayaan dalam rangka menutup defisit/pemanfaatan surplus anggaran.
 - d) Semua aset/sumber daya ekonomis yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang.
 - e) Kewajiban-kewajiban Pemerintah Kabupaten Lumajang kepada pihak ketiga yang belum dibayar/diselesaikan sampai dengan tanggal neraca.
 - f) Kekayaan bersih (Ekuitas Dana) yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang pada tanggal neraca.
 - g) Sumber-sumber penerimaan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi.
 - h) Penggunaan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi.
 - i) Saldo kas dan setara kas pada awal dan akhir periode akuntansi.
 - j) Laporan keuangan pokok Pemerintah Kabupaten Lumajang tahun 2020 terdiri:
 - (1) Laporan Realisasi Anggaran yang menginformasikan tentang perbandingan antara anggaran dan realisasi APBD.
 - (2) Laporan Operasional yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
 - (3) Laporan Perubahan Ekuitas yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
 - (4) Neraca yang menginformasikan tentang posisi aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah daerah pada tanggal 31 Desember 2020.
 - (5) Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi tentang informasi atau penjelasan secara kualitatif atas empat laporan keuangan.